



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSEP KRISTIADI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 915191

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.892.830.000

1. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 361 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/174 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
5. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Bangunan Seluas 80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
7. Tanah Seluas 237 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 592.500.000
8. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000
9. Tanah Seluas 1.008 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 83.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/147 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , Rp. 1.499.330.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.760.147.121
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.652.977.121
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.652.977.121

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.